

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
(PERA) NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BANTUAN
RUMAH KHUSUS
(Studi Pada Kelompok Nelayan Di Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat)**

(SKRIPSI)

Oleh

Muhammad Leo Andika Chandra



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT (PERA) NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BANTUAN RUMAH KHUSUS

**(Studi Pada Kelompok Nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten
Pesisir Barat)**

Oleh

MUHAMMAD LEO ANDIKA CHANDRA

Indonesia sebagai sebuah negara yang mejemuk, menginginkan setiap rakyatnya hidup sejahtera, makmur dan sentosa. Termasuk dalam memiliki tempat tinggal yang layak lingkungannya. UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menerangkan bahwa kesejahteraan masyarakat untuk bertempat tinggal yang layak. Program Sejuta Rumah terdiri dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, bantuan rumah susun dan bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Bantuan Rumah Khusus. Kabupaten Pesisir Barat terpilih sebagai salah satu daerah penerima bantuan. Program hadir berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah yang di ajukan kepada Pemerintah Pusat di wakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan di salurkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat. Program ini bertujuan memberikan prioritas kepada masyarakat nelayan.

Penelitian yang memfokuskan pada proses implementasi kebijakan dalam program bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan dan kendala-kendala yang dihadapi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dan sumber data ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data dan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan implementasi telah berjalan baik sesuai tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Ketersediaan lahan yang memadai menjadi kendala dalam implementasi. Karenanya badan pelaksana harus meningkatkan pola koordinasi dalam mengatasi kendala guna mempermudah pembebasan lahan dan memberikan ruang partisipasi kepada kelompok nelayan.

**Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Peraturan Menteri Perumahan
Rakyat, Program Rumah Khusus, Nelayan**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF PEOPLE'S HOUSING NUMBER 10 OF 2013 CONCERNING SPECIAL HOME ASSISTANCE GUIDELINES (Study on Fishermen Groups in Pesisir Tengah District, Pesisir Barat District)

By

MUHAMMAD LEO ANDIKA CHANDRA

Indonesia as a pluralistic country, wants every of its people to live in prosperity, prosperity and peace. Included in having a decent place to live environment. Law number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas explains that the welfare of the community for proper housing. The Million Houses Program consists of Self-Help Housing Stimulant Assistance, Flat Assistance Assistance and Special Home Assistance for fishermen groups. Based on the Regulation of the Minister of Public Housing Number 10 of 2013 concerning Special Housing Assistance Guidelines. Pesisir Barat Regency was chosen as one of the beneficiary regions. The program comes based on proposals from the Regional Government submitted to the Central Government represented by the Ministry of Public Works and Public Housing and channeled by the Department of Housing and Settlement Areas and the Department of Maritime Affairs and Fisheries of the West Coastal Regency. This program aims to give priority to fishing communities.

The research focuses on the process of implementing policies in specific housing assistance programs for fishermen groups and the obstacles encountered. This research method uses descriptive research type with a qualitative approach. Data collection techniques and data sources are interviews, observation and documentation. With data analysis techniques and data validity. The results show that the implementation has been going well according to the objectives of meeting the needs of people who do not yet have a proper place to live. The availability of adequate land is an obstacle in implementation. Therefore the implementing agency must improve the pattern of coordination in overcoming obstacles in order to facilitate land acquisition and provide space for participation for fishermen groups.

**Keywords: Implementation, Policy, Minister of Public Housing Regulation,
Special House Program, Fishermen**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
(PERA) NOMOR 10TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BANTUAN
RUMAH KHUSUS
(Studi Pada Kelompok Nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten
Pesisir Barat)**

Oleh

MUHAMMAD LEO ANDIKA CHANDRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

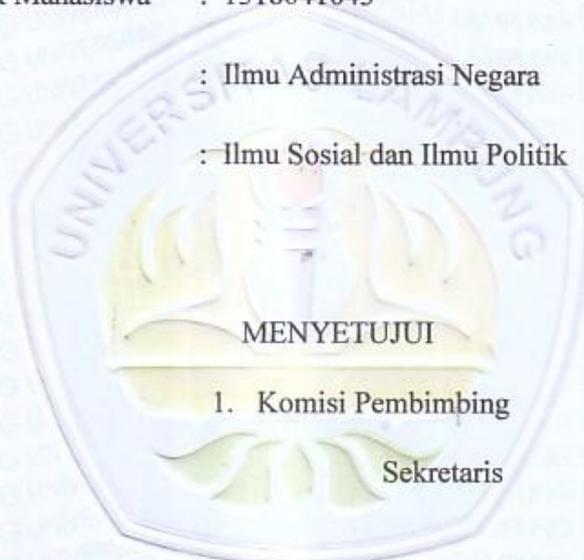
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT (PERA) NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BANTUAN RUMAH KHUSUS (STUDI PADA KELOMPOK NELAYAN DI KECAMATAN PESISIR TENGAH, KABUPATEN PESISIR BARAT)

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD LEO ANDIKA CHANDRA

Nomor Pokok Mahasiswa : 1316041043

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ketua

Sekretaris

Dr. Noverman Duadji, M.Si
NIP. 19691103 200112 1 002

Ita Prihanfika, S.sos, M.A
NIK.19840630 201504 2 002

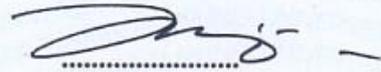
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Noverman Duadji, M.Si
NIP.197507202003121002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Noverman Duadji, M.Si.



Sekretaris : Ita Prihantika, S.sos.,M.P.A.



Penguji Utama : Devi Yulianti, S.A.N., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP.195908031986031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Agustus 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/ Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Leo Andika Chandra

NPM. 1316041043

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur kepada Allah Subhaanahu wata'ala yang maha baik telah meridhoi penyusunan skripsi ini dengan banyak hikmah yang disertakan olehNya selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.

*Terimakasih yang tak terkira kepada kedua orangtuaku:
Ayahandaku Gustam Effendi dan Ibundaku Malla dewi*

*Terimakasih kepada dosen, civitas akademika dalam memberikan bekal ilmu,
teman-teman dan kerabat yang mendukung dan mendoakan
Serta seluruh pihak telah yang membantu*

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Muhammad Leo Andika Chandra, dilahirkan pada 29 Juli 1995 di Sukma Jaya, Depok Jawa Barat. Peneliti adalah anak tunggal dari pasangan Bapak Gustam Effendi dan Ibu Mala Dewi.

Peneliti memulai pendidikan di TK RA AN-NUR Padang Ratu 2000/2001. MIN Padang Ratu tahun 2001/2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Sungkai Utara 2007/2010. Penulis menempuh pendidikan lanjutan di SMA Negeri 1 Sungkai Utara, Lampung Utara 2010/2013.

Peneliti diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2013 melalui jalur PMPAP. Peneliti aktif sebagai anggota Sumber Daya Organisasi (SDO) HIMAGARA Periode 2013/2014, Anggota Hubungan Luar (HUBLU) Periode 2014/2015, Di amanahkan sebagai Sekretaris Bidang Minat dan Bakat (MIKAT) Periode Kepengurusan 2015/2016.

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(QS.94:5-6)

Menggapai yang dicita-citakan, membahagiakan orang-orang
tersayang, mendapatkan hati yang didambakan

(Muhammad Leo Andika Chandra)

Dalam mendalami ilmu, usia jadi batasan yang tidak berlaku.
Begitupun dalam berkarya, kata tua bukanlah sebuah kendala.
Yang fatal adalah saat bertambah usia dan jadi tua tetapi tidak
berbuat apa-apa.

(Pelukis Senja: Sidik Aryono)

SANWACANA

Alhamdulillah, dengan yakin atas rencana Allah SWT beserta segala rahmat, rohmaan, dan rohiim NYA, skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Rumah Khusus (Studi Pada Kelompok Nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat) ini telah selesai pada waktu terbaik menurut perencanaanNYA. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari ada banyak sekali pihak yang membantu dari berbagai aspek, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtuaku: ayah dan ibuk terimakasih atas semuanya terimakasih karna sudah dengan sabar menunggu anakmu yang satu-satunya mampu menyelesaikan studinya. Semoga Allah selalu menjaga ayah ibuk dalam rahmat, keimanan dan ketaqwaan.
2. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si (Pak Nov) selaku dosen pembimbing utama. Terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, ilmu, waktu, nasehat, dan tenaga selama ini. Terimakasih telah menjadi mentor yang baik, yang telah mengajari cara berfikir dan berkembang. Terimakasih banyak Pak Nov, semoga Allah menjaga Bapak dan keluarga selalu dalam kebaikan.
3. Ibu Ita Prihantika, S.sos, M.A selaku dosen pembimbing kedua. Terimakasih pak atas bimbingan, motivasi, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga,

arahan, serta nasehatnya selama ini. semoga Allah menjaga kebaikan Ibu beserta keluarga dimanapun dan kapanpun.

4. Ibu Devi Yulianti, S.A.N, M.A. selaku dosen pembahas. Terimakasih atas setiap saran, kritik dan masukan yang membangun selama ini bu. Semoga Ibu dan keluarga selalu dirahmati Allah.
5. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Bapak Dr.Bambang Utoyo, Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.sos, M.Si., Ibu Rahayu Sulistyowati, S.Ssos, M.Si., Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P., Ibu Dewie Brima Atika, S.I.P, M.Si., Ibu Dr.Novita Tresiana, Bapak Nana Mulyana, S.I.P., M.Si., Ibu Meiliyana, S.I.P., M.A., Ibu Dra.Dian Kagungan, M.H., Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D. terimakasih banyak atas setiap ilmu yang diajarkan kepada penulis.
6. Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terimakasih telah membantu setiap urusan administrasi yang dibutuhkan penulis selama ini.
7. Bapak Zubaidi, S.T, M.T Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Lampung. Terimakasih atas keramahan dan dan apresiasinya kepada peniliti, semoga SNVT dapat bekerja makin baik lagi.
8. Bapak Heby Rakasiwi, S.T. Terimakasih telah membantu memberikan informasi untuk penelitian ini.
9. Bapak Haikal Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat. Terimakasih atas bantuan informasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

10. Bapak Firmansyah Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat. Terimakasih telah membantu memberikan informasi yang berguna bagi penelitian ini.
11. Radinal Staf Koperasi Mina Makmur Lestari Kabupaten Pesisir Barat. Terimakasih telah bersedia memberikan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Saudara-saudaraku Alasmenara : Para penghuni kosdik (yang dari dulu tidak pernah berganti nama) Sidik Pelukis Senja (teman pertama saat jadi maba, paling tua, paling sabar, paling rajin, paling aneh, ketum terbaik, sayangnya dia pernah pacaran pake akun fake di fb), Dinda Ucok (orang Palembang yang punya leher tebal dan paling misterius, rival abadi main ps, pakar dalam konsep pernikahan katanya, orang paling mager seangkatan, cepet cari kerja cok, gua doain semoga gambaran masa depan yang di idamkan terwujud), Adi Gugum (bos ngaosmurah, sosok kawan yang paling peduli tapi gak pernah keliatan), Ari Balur (cuman senior dan kawan seangkatan yang dia relain manggil begitu, orang Lampung tengah asli, sosok yang setia kawan, dulunya addict banget sama jkt48 setelah gua racun jadi suka kpop dan drakor), Pindo Pondi (sosok ketua angkatan yang paling bisa diandalkan, sosok orang paling peduli sama angkatannya walaupun pas pemilihan gua gak milih dia, umur paling muda tapi bisa paling dewasa, semoga langgeng ndo sama rusa (rafika). Zulham Njui (ketuplak wismagara yang suka menyendiri, gua baru tau kalo ternyata kita sodaraan, orang yang pernah punya cerita rivalan sama kawan soal cewe, orang suka ngide, semoga lo jadi wakil rakyat yang amanah om dan dapet cewe yang baik buat lo. Aminn), Dhimas Brimob Honor (badan gede tapi sayang penakut

sama hal-hal lucu, stand up comedian tapi sayang udah gak lucu, sosok panutanku soal kemandirian, semoga sukses sam) Hafiz Ambon (orang yg gua kira alim gak taunya kelakuan, paling jago kalo soal sepik-sepik cewe, paling getol kalo udah nyari duit, paling jago kalo main futsal). Wanita-wanita ku kosan Al-baroqah (tempat mencari pencerahan selama kuliah) Uki ukis (orang waykanaan tapi logat nya udah kayak orang jakarte, punya suara paling ngebass, paling perhatian sama kawan-kawannya, sukses ya kis semoga bisa bertemu jodoh yang diharapkan. Aminn) Ghina ghindut (kesayangan anak kosdik, paling addict sama makanan ayam, paling polos jadi paling sering di jahilin, partner cemil-cemil, sukses selalu ndut jangan sampe pecah kongsi sama uki) Uun wuwun (ibu angkatan alasmenara, paling judes tapi paling sering sakit, semoga bisa disegerakan niat baik kalian. Aminn) Septiya (sosok emaknya al-baroqah, paling rajin kalo dibandingin uki sama ghina, paling kalem, menantu idaman mertua kamu sep, tak doain sukses dan ditunggu kabar baiknya) Okke (si kurus dari kalirejo, partner nya septiya, kalo sekalinya ngomong suka pas, sukses ya kke cepet dapet jodoh) Ala (nama aslinya sarah, adele nya alasmenara, paling suka bawain masakan buatannya, alhamdulillah ya mbak semoga langgeng dengan pasangannya, sukses mbak) Defita (pacarnya arif, orang mesuji, galak tapi lucu, langgeng terus def) Zikri zikzik (partner kabit mikat, nonton, futsal, mabar pubg, punya teknik tendangan tanpa melihat semoga cepet dapet pengganti doi pak) Arief (pacarnya defita, partner nonton, futsal, haters nomor satunya zikri, ayok geh selesain rif) Okta (kita manggilnya pak abu, atlet inline skate wheeling, pacarnya mbak 2011) Galih (begal lampung timur yang udah gak bujang) Sedy (pacarnya arinta, hobi anime,

sempet turbro, sukses terus sed) Ayu W (kepala rombongan), Dila (mojang geulis), Hendro (sang musisi berwajah kotak), Dwi (sang pecinta naruto), Eka (gadis metro yang hobi travelling), Laras (si makhluk kecil yang sebenarnya tua), Ratu (si introvert nan sopan), Riska (punya cerita mistis yang terkenang), Sasa (pernah di ajak makan dirumah makan nya), Luse (si penyuka doraemon), Arinta (yang baik dan pendiam, pacarnya sedy), Desti (manusia tinggi dan murah senyum mirip shanju jkt48), Rindu (kpop sejati), Pepah (kance nya rindu), Meilika (keliatan judes tapi aslinya baik), Ade (masih tomboy gak de?), Agnes (tailalat mempesona dibawah hidung dan diatas bibir tepat ditengah), Fajar (mirip polisi), Andan (orang krui yang medok), Anggi (bujang jawa yang sopan), Asti (si gadis kuantitatif), Ayu Krui (mantan Ketum UKMBS), Cici (si model cantik), Eci, Emon (teman KKN hasby), Devi P (yang sering dipanggil decil), Devi Y (rambutnya yang selalu panjang), Nuris (gadis medok pesawaran), Ellyza (yang sempat hilang kemudian come back), Elva (si cantik dari Lambar), Fella (ponakan nya bung pay), Ghozie (pernah jadi ketum hentai), Isti (partner nya eka), Hendriyansyah (anaknya kyai herman), Kartika F (umi-umi pengajian yang baik dan perhatian), Lela (koor konsumsi yang menjadi idola), Hasby (si psikopat dan punya lawakan aneh), Iqbal (mirip sidik), Nanda (pernah jatuh sama iqbal), Nisa (orang tanggerang yang di sukai kawan), Nita (yang rumahnya belakang kelurahan), Oca (yang nikah duluan), Yoga (budak Prabumulih), Yogi (bli pagelaran, yang hobinya PP), Resghi (si pelukis dan gapoktan), Respaty (si rindaman), Revardo (rambut tebal yang suka terbang kalo jalan), Rico (si batak berkacamata), Syntia (satu beasiswa), taufiq (ketua rombongan ropik), Tiara (istri nya nyum), Tulva (jarang ada

ngobrol sama dia), Vania (anak Medan yang jarang pulang), Wahyu (yang pernah bawa dinda ke kosan nya), Wiza (gadis padang mirip bu rahayu), Wulan (cewe kalem dan suka telat nyambung), Dewi A (orang kotabumi), Fitri W (orang tubaba yang lulus duluan), Hendriko (batak mesuji), Jita (orang martapura yang pernah satu kereta bareng), Maya (yang dulunya pernah kuliah di mipa), Meylani (yang marganya sama dengan Pak Simon), Pepy (yang pernah punya cerita lucu sama gua), Rahma (si gadis batak yang gak kayak orang batak), Rijkiana (fotografer yang hobi futsal), Kartika R (yang paling blak-blakan). Teman-teman yang diberi jalan berbeda: Edo (pak polisi), Mala (si solihah dari negeri Jiran), Bayu (yang udah jadi bapak-bapak), Khaidir (bujang jawa yang selalu jenaka), Gibran (si IPDN yang suka ketawa sendiri), Silvi (yang gak ada kabar), Panji (yang masuk STAN).

13. Untuk Keluarga KKN Desa Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih kepada keluarga bapak Kamil dan masyarakat desa gedung ratu. Dan juga wanita-wanita satu kelompok ku Retno Apriliani, Nafisatutalillah, Maria Sofa, Silvia Anggraini, Yoni Hartati, Fabia Yola. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari kisah selama melakukan pengabdian kepada masyarakat.
14. Keluarga besar HIMAGARA, terimakasih banyak kepada Bang Ari 01, Bang Surya 02, Bang Fajrin 06, Bang Vicko 06, Bang Joko 08, Bang Yondri 08, Bang Cindang 08, Bang Guruh 09, Bang Agus Nyom 09, Bang Angga 09, Bang Fahmi 09. Abang-abang ADUSELON Bang Aden 10, Bang Loy 10, Bang Syamsu 10, Bang Abil 10, Bang Uyung 10, Bang Ardi 10, Bang Satria 10, Bang Bogel 10, Bang Beg 10, Bang Efridho 10, Bang Woro 10, Bang

Taufik 10. Abang dan Mbak ANTIMAPIA Bang Oji 011, Bang Pongki 011, Bang Ahmed 011, Bang Menceng 011, Bang Rizki 011, Bang Rosyid 011, Bang Upil 011, Mbak Vike 011, Mbak Kristi 011, Mbak Tiwi 011, Mbak Popo 011. Kawan-kawan AMPERA, Bang Denish 012, Bang Bery 012, Bang Irlan 012, Ayah Akbar 012, Bang Alga 012, Bang Rezki 012, Bang Tripang 012, Mbak Dila 012, Mbak Silvi 012, Mbak Merita 012, Mbak Dian 012, Mbak Nisul 012, Mbak Dara 012, Mbak Purnama 012. Teruntuk adik-adik GELASANTIK Binter, Astri, Adi, Suci, Ara, Nuridin, Anung, Ferry, Adon, Septi, Thiza, Asih, Siska, Andra, Adi Kuncup, Sangga, Nihan. Adik-adik ATLANTIK Annisa Oca (si kecil namun paling berisik), Nandita (yang selalu sibuk dengan masalah percintaan nya), Hastin (yang punya sosok keibuan), Thanzilul (paling tomboy tapi dan punya suara good), Ijal sobri (adeknya samid), Rizeki, Kadek, Cindy, Ana, Meika, Maulidya, Dedi, Dinan, Nafi, Fathon, Gusti, Tala, Riski, Fitri, Aldino, Elva, Tina, Panjul. Dan adik-adik ALASKA, ANGKASA, ANDALUSIA yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih telah bersama-sama dan mengajarkan banyak hal kepada penulis selama kuliah di FISIP Unila.

15. Semua pihak yang membantu secara langsung atau tidak langsung selama penulis kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan peneliti. Jika masih terdapat banyak kekurangan, dapat dijadikan evaluasi atau penelitian lanjutan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukan

Bandar Lampung, April 2019

Penulis

Muhammad Leo Andika Chandra

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	10
1. Pengertian Tentang Kebijakan Publik	10
2. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik.....	11
3. Model Implementasi Kebijakan Publik	12
B. Tinjauan Tentang Bantuan Rumah Khusus	16
1. Pengertian Rumah Khusus	16
2. Manfaat Bantuan Rumah Khusus.....	16
3. Syarat Bantuan Rumah Khusus.....	16
C. Tinjauan Tentang Nelayan.....	19
1. Pengertian Nelayan	19
D. Kerangka Pikir	20
III. METODE PENELITIAN	23
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	23
B. Fokus Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian	25
D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	26
E. Teknik Analisis Data	31
F. Teknik Keabsahan Data	33

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Kabupaten Pesisir Barat.....	37
2. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Lampung	42
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat.....	51
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.....	54
B. Hasil Penelitian	57
1. Deskripsi Pelaksanaan Program Rumah Khusus bagi Kelompok Nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat	57
a. Karakteristik Masalah.....	58
b. Karakteristik Kebijakan / Undang-Undang	68
c. Variabel Lingkungan	82
C. Pembahasan	89
1. Karakteristik Dari Masalah (<i>tractability of the problem</i>).....	90
2. Karakteristik Kebijakan / Undang-Undang (<i>ability of statute of structure implementation</i>)	96
3. Variabel Lingkungan (<i>nonstatutory variables affecting implementation</i>).....	108
 V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Persebaran Program Sejuta Rumah di Indonesia	3
Tabel 2. Informan Penelitian.....	28
Tabel 3. Data Dokumen Penelitian	31
Tabel 4. Persebaran Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin	41
Tabel 5. Persebaran Jumlah Nelayan di Kabupaten Pesisir Barat Menurut Kecamatan	42
Tabel 6. Penduduk Miskin di Kabupaten Pesisir Barat, 2015-2016	58
Tabel 7. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat, 2015-2016	58
Tabel 8. Jumlah Penduduk di Kabupaten Pesisir Barat 2014-2016	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 2. Stuktur Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).....	43
Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat.....	54
Gambar 4. Rapat Koordinasi oleh SNVT, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat	76

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara yang majemuk, menginginkan bahwa setiap rakyatnya agar sejahtera, makmur dan sentosa. Karena telah menjadi kewajiban bagi negara untuk melaksanakan perannya dalam membahagiakan rakyatnya. Seperti yang tertuang dalam isi UUD 1945 dengan bunyi “kemudian dari pada itu untuk membentuk sebuah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, mak disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945”. Melalui dasar tersebut pemerintah sebagai penggerak dari keberlangsungan pengelolaan sebuah negara, bekerja keras untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Faktor filosofi mempengaruhi peran pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyatnya UUD 1945 pasal (1) dan (2) menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

UU 1945 pemerintahan Presiden Joko Widodo menciptakan sebuah etos kerja dengan sebutan “Nawa Cita” yang di dalamnya berkaitan dengan penyediaan rumah layak bagi masyarakat miskin yang belum memiliki tempat tinggal. Dengan harapan dapat menunjang penghidupan yang baik dan terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang memberikan penjelasan terkait penyediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dengan bertempat tinggal dengan mendapatkan lingkungan yang baik. Dengan dasar nilai dari UU tersebut hadirilah kebijakan yang memberikan bantuan rumah layak melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memprioritaskan masyarakat miskin yang belum mempunyai rumah layak serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam kebijakan program sejuta rumah pemerintah berusaha menyediakan rumah tinggal bagi 13,5 juta kepala rumah tangga di seluruh Indonesia. Angka rincian bagi program sejuta rumah sebanyak 603.561 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 396.484 unit rumah bagi masyarakat non berpenghasilan rendah. Program yang dirancang untuk mengurangi permukiman kumuh di Indonesia, melalui 2 jenis rumah yang akan dibangun yaitu rumah susun dan rumah setapak. *(Dikutip dari setkab.go 2016, diakses pada 16 Februari 2017 Pukul 23.17 WIB)*

Pada tahun 2016 persebaran Program Sejuta Rumah di tandai dengan terpilihnya 21 provinsi dari 34 provinsi yang terdapat di seluruh Indonesia. Di tahun pertama ini 21 provinsi menjadi prioritas sasaran pelaksanaan Program Sejuta Rumah. Dan

berikut tabel rincian persebaran dari bantuan program sejuta rumah di Indonesia yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel. 1 Persebaran Program Sejuta Rumah di Indonesia

NO	PROVINSI	RUMAH SETAPAK	RUMAH SUSUN
1.	Jawa Barat	74.263	350+184
2.	Jawa Timur	26.717	
3.	Sumatera Utara	16.305	1.832
4.	Yogyakarta	977	15.903
5.	Kalimantan Barat	15.893	
6.	Banten	14.615	
7.	Jawa Tengah	11.720	1.200
8.	Sumatera Selatan	7.926	2.000
9.	Lampung	9.032	
10.	Kalimantan Selatan	8.429	
11.	Kepulauan Riau	7.721	
12.	Bangka Belitung	7.530	
13.	Riau	6.523	
14.	Nanggroe Aceh Darussalam	5.945	
15.	Kalimantan Timur	5.832	
16.	Bengkulu	5.426	
17.	Jambi	4.344	
18.	DKI Jakarta	50	3.754
19.	Sumatera Barat	3.332	
20.	Kalimantan Tengah	975	
21.	Kalimantan Utara	320	
	TOTAL UNIT	233.873	25.223

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Provinsi Lampung, Tahun 2016*

Tabel 1 menunjukkan tentang kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak, sebagai bentuk tanggapan pemerintah guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui adanya rumah layak demi terciptanya kehidupan yang lebih baik. Kebijakan mengenai hal itu di tandai dari terpilihnya 21 provinsi dari 34 provinsi di seluruh Indonesia yang menjadi bagian pertama sasaran pelaksanaan Program Sejuta Rumah di tahun 2016. Melalui kebijakan program bantuan rumah

khusus bagi nelayan mampu menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak.

Kebijakan program sejuta rumah sejatinya berisikan 3 (tiga) program bantuan yang mengutamakan masyarakat miskin yang belum memiliki rumah, diantaranya program Bantuann Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu berupa bantuan peningkatan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak menjadi rumah layak, program ini biasanya disebut dengan program bedah rumah. Selanjutnya bantuan yang dikhususkan bagi pondok pesantren untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan keagamaan, bantuan tersebut berupa bantuan Rumah Susun. Kemudian bantuan yang ditujukan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di daerah pesisir pantai berupa bantuan rumah khusus bagi nelayan. Bantuan yang dikhususkan bagi nelayan ini dengan maksud untuk membentuk kehidupan yang baik mengarah terhadap tingkat kesulitan masyarakat nelayan, yang di mulai dari lingkungan tempat tinggal yang baik.

Tingkat kesulitan yang di hadapi masyarakat nelayan dalam kehidupan sehari-hari mempengaruhi taraf hidup terhadap kemajemukan masyarakat sebagai kelompok sasaran pelaksanaan program. Berdasarkan Hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2013 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa 2,2 % kepala rumah tangga di Indonesia berprofesi sebagai nelayan. Jumlahnya sekitar 1,4 juta dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Indonesia sekitar 4 orang dalam satu rumah. Berarti ada sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia kehidupannya bergantung pada mata pencaharian sebagai nelayan. Sementara jumlah dari keseluruhan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan sebanyak 2,17 juta (0,87%), serta sekitar 700.000 lebih nelayan yang berstatus bukan sebagai kepala

rumah tangga. Sebagian besar dari nelayan tersebar di 3.216 desa yang di kategorikan sebagai Desa Nelayan (mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan). Secara geografis nelayan terdapat di seluruh wilayah Indonesia, mengingat dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah lautan. *(Dikutip dari nasional.kompas.com. 2014. Hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2013 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). (Online), diakses pada 16 Februari 2017 Pukul 23.22 WIB)*

Provinsi Lampung menjadi bagian dari 21 provinsi yang terpilih pada pembangunan tahap awal pelaksanaan program sejuta rumah. Pelaksanaan pembangunan yang dimulai pada tahun 2016 menjadi tahap pertama yang dikerjakan langsung oleh Kementerian PUPR berikut Pemerintah daerah provinsi Lampung yang bekerja sama dengan pihak swasta. Program bantuan rumah khusus bagi nelayan sebagai bagian dalam program sejuta rumah ditempatkan pada Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Mesuji. Pada tahun yang sama pelaksanaan program tersebut telah menghasilkan 112 unit rumah yang tersebar di masing-masing kabupaten. Terpilihnya kabupaten Pesisir Barat dan Mesuji dikarenakan letak geografis dari masing-masing kabupaten yang berdekatan dengan air laut ataupun sungai, dimana banyak dari masyarakat disana yang berprofesi sebagai nelayan.

Sejarahnya Kabupaten Pesisir Barat adalah kabupaten hasil dari pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Luas wilayahnya 2.907,23 km dengan panjang pantai 210 km yang terbentang dari Kecamatan Bengkunt Belimbing di bagian Selatan sampai Kecamatan Lemong di Bagian Utara. Daerah yang memiliki potensi besar

dalam sektor kelautan dan perikanan, namun hingga kini belum mampu memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus, pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga ke tatanan dinas saling berkomitmen dalam implementasi program tersebut. Program bantuan rumah khusus bagi nelayan di danai oleh APBN, yang dihadirkan melalui usulan dari pemerintah daerah yang melihat kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang di teruskan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang selanjutnya diverifikasi, setelah itu barulah pelaksanaan pembangunan secara teknis dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kemudian di tanggapi oleh pemerintah daerah dengan menyediakan lahan bagi pembangunan rumah khusus bagi nelayan tersebut, serta berperan dalam pengalokasian bantuan kepada masyarakat. Pelaksanaannya Kementerian PUPR membentuk sebuah satuan kerja yang menjadi perwakilan mereka di tiap-tiap daerah, satuan kerja tersebut yaitu Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).

Pembangunan tahun kedua di Kabupaten Pesisir Barat mendapatkan alokasi pembangunan bantuan rumah khusus bagi nelayan sebanyak seratus (100) unit. Pembangunan rumah khusus nelayan tersebut ditempatkan di Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pesisir Tengah masing-masing sebanyak lima puluh (50) unit. Selanjutnya pada sisi lain, pembangunan rumah khusus bagi nelayan di Kecamatan Lemong telah selesai dibangun dan siap untuk dihuni, perlu diketahui pada rumah khusus nelayan ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan dari nelayan seperti peralatan rumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada 20 November 2017 di Kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Lampung dalam implementasi Program Bantuan Rumah Khusus bagi kelompok nelayan diketahui bahwa ketersediaan rumah yang diberikan belum mampu mencakup seluruh jumlah nelayan miskin yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat. Menurut Kepala PKK Bidang Rumah Khusus dalam Satuan Kerja NonVertikal Tertentu Heby Rakasiwi mengungkapkan bahwa kebutuhan masyarakat nelayan terhadap tempat tinggal yang layak cukup tinggi sehingga menimbulkan ketimpangan sosial antar masyarakat.

Ketersediaan rumah yang belum mampu mencakup jumlah keseluruhan nelayan miskin yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka menyediakan satu juta rumah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah. Dengan harapan hadirnya program rumah khusus bagi kelompok nelayan mampu memberikan kesejahteraan dengan memiliki rumah layak dengan kualitas lingkungan yang baik serta mampu memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan hidup bagi para kelompok nelayan tersebut. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Rumah Khusus (Studi Pada Kelompok Nelayan Di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman dalam bantuan rumah

khusus pada kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat?

2. Apakah kendala-kendala yang di hadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman dalam bantuan rumah khusus pada kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat diambil dari penjelasan latar belakang masalah yaitu:

1. Ditemukannya deskripsi tentang dalam implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman dalam bantuan rumah khusus pada kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman dalam bantuan rumah khusus pada kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis mendeskripsikan tingkat keberhasilan dalam sebuah implementasi kebijakan dengan terpenuhinya indikator-indikator tentang

keberhasilan implementasi, sehingga hal tersebut dipakai oleh mahasiswa ilmu administrasi publik beserta lainya sebagai pengetahuan dalam kegiatan penelitian.

2. Manfaat praktis menjawab kegagalan pada implementasi kebijakan yang tertera dalam tujuan, digunakan oleh para *stakeholder* sebagai pertimbangannya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dibuat dalam rangka memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang segala sesuatunya yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Anderson & Henry dalam Subarsono (2005:88) berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa

dampak pada warga negaranya. Dalam literatur administrasi negara klasik, politik dan administrasi dipisahkan.

Implementasi kebijakan melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky dalam Subarsono (2005:88) disebut sebagai “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi menurut Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin dalam Subarsono (2005:89) menulis sebagai berikut :

”Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals also expectation who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of government programs that require participation from numerous layers and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control”.

Kompleksitas pada implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional dan masing-masing variabel tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

2. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik untuk membagi proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian ini memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.

Menurut Anderson dalam Subarsono (2006:12) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (*Problem Formulation*): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (*Formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternative-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (*Adoption*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (*Implementation*): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (*Evaluation*): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan para pakar analisis kebijakan menggunakan alat konseptual tertentu untuk membantu pekerjaan mereka dalam memvisualisasikan realita implementasi kebijakan yang kompleks. Diantara sejumlah alat konseptual yang ada, yang paling sering dipakai dan bermanfaat

bagi keperluan analisis berupa model-model atau tipologi-tipologi tertentu. Dengan bekal model-model tipologi-tipologi itu, analisis kebijakan akan lebih dipermudah tugasnya dalam memahami proses implementasi kebijakan itu berlangsung.

Menurut Merilee S. Grindle dalam Mulyadi (2015:66) bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Dengan menjadikan ide dasar setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilaksanakan. Keberhasilannya ditentukan melalui derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Menurut George C. Edward III dalam Mulyadi (2015:68) mengemukakan 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Sehingga untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan perlu diinternalisasikan dengan sinergi dan intensif.

Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Mulyadi (2015:72) mengemukakan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi implementor. Dengan demikian masing-masing variabel merupakan faktor-faktor yang signifikan yang saling mempengaruhi untuk tercapainya kinerja implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Malcolm Goggin, Ann Bowman dan James Lester dalam Mulyadi (2015:77) mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “communication model” dalam implementasi kebijakan yang disebut sebagai generasi ketiga dalam model implementasi kebijakan. Dengan tujuan mengembangkan implementasi kebijakan “lebih ilmiah” yang mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel independen dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

Model Mazmanian dan Sabatier dalam Mulyadi (2015:70) mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik dari kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), serta variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Dengan masing-masing kelompok variabel agar di kelola dengan baik dan terukur sesuai karakteristik tersebut.

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*)
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
 - b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran
 - c. Proporsi kelompok sasaran
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
2. Karakteristik kebijakan / Undang-undang (*ability of statute of structure implementation*)
 - a. Kejelasan isi kebijakan
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis

- c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan
3. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*)
- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
 - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
 - c. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor

Berdasarkan model-model implementasi kebijakan dari beberapa ahli , peneliti menggunakan model implementasi Mazmanian dan Sabatier. Menurut peneliti model implementasi ini memiliki kesesuaian dengan kebijakan dengan dasar 3 variabel yakni karakteristik masalah sebagai akar dari terbentuknya kebijakan, karakteristik kebijakan dengan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam implementasi kebijakan dan karakteristik lingkungan yang mempengaruhi implementasi berjalan sesuai tujuan yang di capai. Melalui model ini peneliti menyimpulkan bahwa masing-masing kelompok variabel dapat di sesuaikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

B. Tinjauan Tentang Bantuan Rumah Khusus

1. Pengertian Rumah Khusus

Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus (UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

2. Manfaat Bantuan Rumah Khusus

Adapun manfaat dari penerima bantuan rumah khusus tersebut sebagai berikut :

1. Masyarakat di wilayah Perbatasan Negara
2. Prajurit dan/atau Petugas Negara
3. Masyarakat Nelayan
4. Masyarakat yang terkena program pembangunan pemerintah Korban Bencana Alam
5. Masyarakat yang bertempat tinggal di pulau terluar, terpencil atau pedalaman Masyarakat di lokasi rawan resiko sosial
6. Masyarakat dalam wilayah pengolah sumber daya alam

3. Syarat Bantuan Rumah Khusus

Syarat bantuan rumah khusus dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Lokasi
 1. Harus sesuai dengan RTRW/RDTRK
 2. Tersedianya infrastruktur (jalan akses, air minum, listrik)
- b. Tanah

1. Luas minimal 1 (satu) Ha atau 50 unit rumah mengelompok satu hamparan
 2. Jelas status hukum kepemilikan hak atas tanah (dengan bukti legalitas/ sertifikat) Tanah siap bangun
- c. Sudah ada calon penerima bantuan Rumah Khusus
- d. Menyampaikan surat permohonan bantuan kepada koordinator Penerima Bantuan (Pemda, KKP, BNPP, Kemenhan, Polri) yang selanjutnya akan diteruskan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- e. Surat Permohonan dilampiri Proposal yang berisikan:
1. Gambaran umum penerima manfaat, lokasi, tanah, dan sebagainya
 2. kebutuhan rumah, rencana/ sudah dibangun oleh Penerima Bantuan, dan usulan bantuan.
 3. Surat dukungan dari Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota
 4. Surat pernyataan dan kesanggupan dari Penerima Bantuan

Surat Pernyataan dan kesanggupan dari Calon Penerima Bantuan Rumah Khusus berisi, antara lain:

- a. Pernyataan bersedia menyediakan tanah untuk pembangunan Rumah Khusus, yang dilengkapi rekomendasi dari Pemerintah daerah tentang diijinkannya membangun Rumah Khusus
- b. Pernyataan bahwa telah ada calon penerima bantuan Rumah Khusus
- c. Kesanggupan:
 1. Tidak akan merubah lokasi pembangunan yang telah disepakati,
 2. Membantu proses terbitnya perijinan (IMB),
 3. Tidakakan merubah desain yang sudah ditetapkan,

4. Segera memanfaatkan dan menyerahkan Rumah Khusus kepada Penerima Manfaat
5. Bersedia menerima dan mengelola Rumah Khusus beserta kelengkapannya.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus dalam Bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Provinsi:

- a. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- b. Memberikan Bantuan Teknis dan pemantauan pelaksanaan pembangunan;
Pemerintah Kabupaten/Kota:
 1. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
 2. Memberikan Bantuan Teknis, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
 3. Menyediakan Alokasi dana APBD Kabupaten/Kota untuk membangun Rumah Khusus dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah khusus.
 4. Memberikan kemudahan perizinan dan keringanan retribusi dalam penerbitan IMB;
 5. Memberikan jaminan ketersediaan daya listrik dan air minum yang memadai.

C. Tinjauan Tentang Nelayan

1. Pengertian Nelayan

Nelayan sebagai profesi yang menggantungkan hidupnya terhadap hasil tangkap-menangkap ikan di laut. Menurut (Sastrawidjaya: 2002) Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir. Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut :

- a. Segi mata pencaharian, nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir, atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka.
- b. Segi cara hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.
- c. Segi keterampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara profesional.
- d. Bangunan struktur sosial, komunitas nelayan terdiri atas komunitas yang heterogen dan homogen. Masyarakat yang heterogen adalah mereka yang bermukim di desa-desa yang mudah dijangkau secara transportasi darat, sedangkan komunitas yang homogen terdapat di desa-desa nelayan terpencil biasanya menggunakan alat-alat tangkap ikan yang sederhana,

sehingga produktivitas kecil. Sementara itu kesulitan transportasi angkutan hasil ke pasar juga akan menjadi penyebab rendahnya harga hasil laut di daerah mereka.

Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain, sedangkan nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

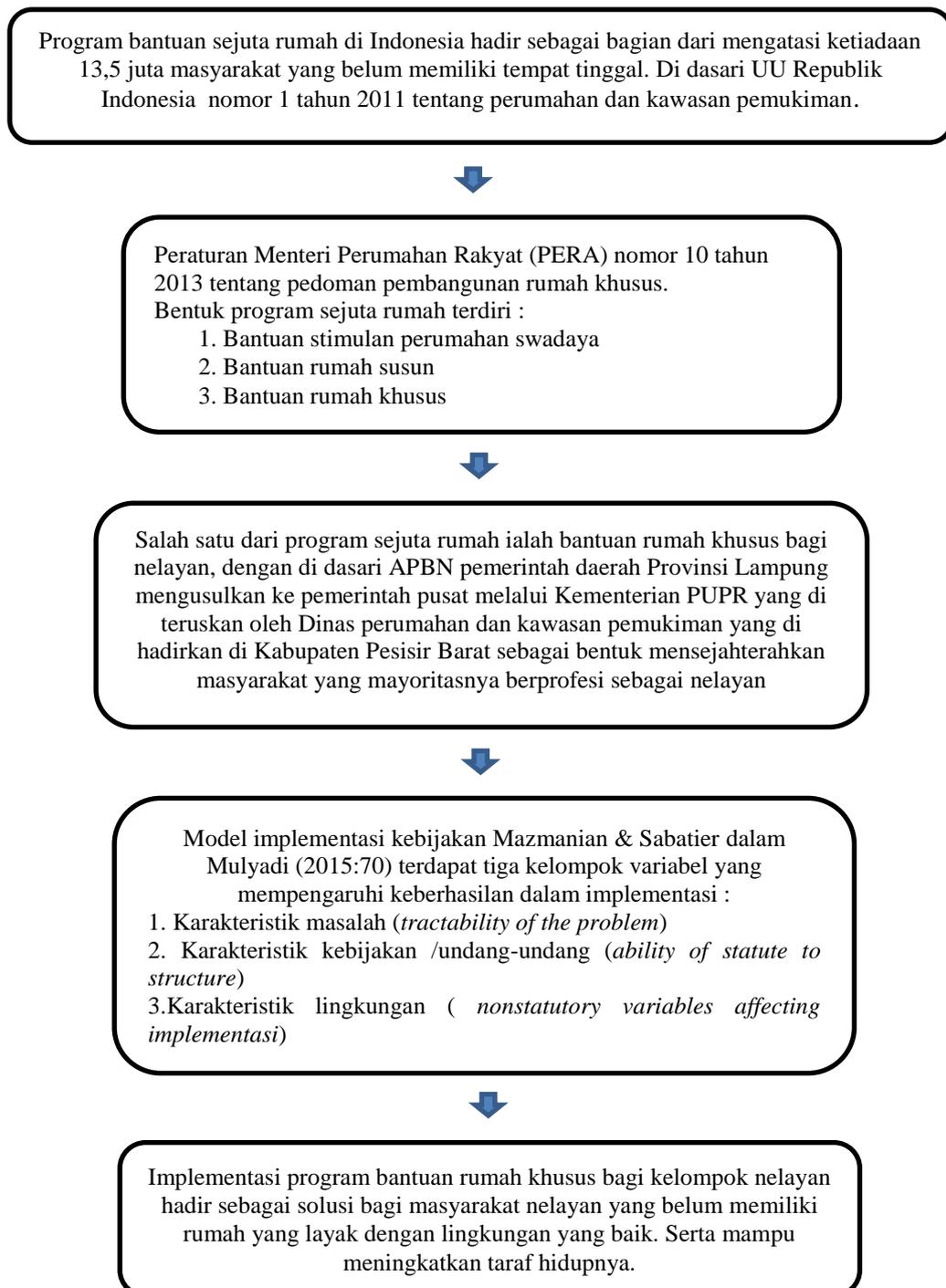
D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang paling mendasar yang menjadi fondasi bagi setiap pemikiran lainnya. Pemahaman itu merupakan landasan bagi pemahaman-pemahaman selanjutnya. Kerangka berpikir berarti menyusun langkah-langkah sistematis dalam mengolah konsep-konsep ke dalam proses penteorian yang akan dibuat dalam penelitian. Berikut adalah kerangka pemikiran implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman bantuan rumah khusus :

Kebijakan dalam program sejuta rumah hadir sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi 13,5 juta ketiadaan masyarakat dalam memiliki rumah yang layak. UU Republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman yang kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman pembangunan rumah khusus. Program sejuta rumah memiliki bentuk program yang diantaranya ialah Bantuan stimulan perumahan swadaya, Bantuan rumah susun dan Bantuan

rumah khusus. Salah satu dari ketiga program sejuta rumah ialah bantuan rumah khusus bagi nelayan, dengan APBN pemerintah daerah Provinsi Lampung mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang diteruskan oleh Dinas perumahan dan kawasan pemukiman yang di hadirkan di Kabupaten Pesisir Barat sebagai bentuk mensejahterahkan masyarakat yang mayoritasnya berprofesi sebagai nelayan.

Model implementasi Mazmanian & Sabatier dalam Mulyadi (2015:70) terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi : karakteristik masalah (*tractability of the problem*), karakteristik kebijakan /undang-undang (*ability of statute to structure*), karakteristik lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementasi*) dalam implementasi program bantuan rumah khusus bagi nelayan tiga kelompok variabel mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi dapat memperbaiki kehidupan masyarakat dengan di dasari lingkungan yang baik. Terlepas dari kendala-kendala yang di hadapi dalam proses implementasi.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh peneliti

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2013:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maksud penulis menggunakan tipe ini ialah untuk melihat, mendeskripsikan, dan memperoleh pemahaman tentang bagaimana proses implementasi pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Yang diharapkan nantinya penulis dapat memberikan gambaran tentang proses implementasi yang terdapat dilapangan serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman bantuan rumah khusus.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berguna untuk membatasi studi dan membatasi dalam pengumpulan data. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu fokus peneliti akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan peneliti. Menurut Moleong (2013: 94) dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Fokus penelitian yang pertama ditujukan pada bagaimana proses implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Mulyadi (2015: 70) antara lain:

1. Implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) Nomor 10 tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Rumah Khusus pada kelompok Nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dengan indikator yang mempengaruhi. Menurut Mazmanian dan Sabatier keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh 3 kelompok variabel dengan aspek-aspek yang mengukurnya antara lain:
 - a) Karakteristik masalah yang mendasari implementasi program bantuan rumah khusus bagi nelayan dengan indikator yang mempengaruhi tingkat kesulitan dalam kemajemukan kelompok masyarakat nelayan.
 - b) Karakteristik teoritis sebagai dasar implementasi program bantuan rumah khusus bagi nelayan melalui para aktor-aktor yang berkomitmen dalam pengaruh keberhasilan implementasi sesuai yang di harapkan.

- c) Faktor variabel lingkungan dengan mencakup berbagai aspek seperti sosial, ekonomi terhadap dukungan implementasi program bantuan rumah khusus bagi nelayan menentukan keberhasilan yang akan di capai.
2. Kendala-kendala yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) Nomor 10 tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Rumah Khusus pada kelompok Nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat :
- a) Kendala internal dalam implementasi program bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.
 - b) Kendala eksternal yang mempengaruhi implementasi program bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.

C. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2013 : 128), lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lokasi penelitian adalah dengan jalan mempertimbangkan fokus serta rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah kantor-kantor *stakeholder* yang berperan dalam proses implementasi program rumah khusus bagi kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir, Kabupaten Pesisir Barat. Kantor-kantor *stakeholder* yang dimaksud oleh peneliti adalah, Kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Lampung, Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir

Barat, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, Kantor Koperasi Nelayan Mina Makmur Lestari dan Lokasi Tempat Pembangunan bantuan di Pelelangan Ikan (TPI) Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah.

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2013:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti membagi data dalam penelitian ini ke dalam 2 (dua) jenis yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada dilokasi penelitian. Data-data tersebut merupakan bahan analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa hasil wawancara dan pengamatan pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT), Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Barat. Serta beberapa masyarakat yang berkaitan dengan fokus penelitian.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumber data atau seorang informan. Wawancara yang akan penulis lakukan dengan teknik wawancara berstruktur dan tidak struktur. Wawancara berstruktur dengan cara menggunakan panduan wawancara sehingga informasi yang diperoleh tidak menyimpang dan mampu menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah mewawancarai informan

mengenai apa saja yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tanpa panduan pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam. Informasi yang diinginkan dari informan yaitu berkaitan dengan proses implementasi bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara berstruktur dengan menggunakan panduan wawancara. Panduan wawancara tersebut dibuat oleh peneliti berdasarkan batasan-batasan melalui fokus penelitian untuk memaksimalkan hasil penelitian yang diharapkan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan media elektronik berupa *handphone* untuk mencatat hasil dari wawancara kepada informan.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, menemui informan baru yang berkaitan dalam melengkapi data-data penelitian. maka dalam penelitian ini menggunakan *snowball sampling* (Sugiono: 2011). *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya hingga jumlah sampel semakin banyak. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2. Daftar Nama Informan Wawancara

NO	Informan	Informasi	Tanggal Wawancara
1	Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Lampung	Tahapan dalam pelaksanaan program bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan	28 Agustus 2018
2	Ketua PKK Bidang Perumahan (SNVT) Provinsi Lampung	Tahapan dan pelaksanaan koordinasi dalam program bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan	28 Agustus 2018
3	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat	Proses tahapan pengusulan dalam program bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan	22 November 2018
4	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat	Proses pengusulan penerima bantuan dan pengelolaan bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat	22 November 2018
5	Staf Bidang Nelayan Koperasi Mina Makmur Lestari Kabupaten Pesisir Barat	Proses tahapan pengusulan dan pengelolaan dalam program bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat	22 November 2018
6.	Masyarakat Nelayan Penerima Bantuan Rumah Khusus bagi Kelompok Nelayan	Dampak dan harapan dari Bantuan Rumah Khusus bagi Kelompok Nelayan	22 November 2018

Sumber :diolah oleh peneliti, 2018

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dikontrol reliabilitasnya dan validitasnya. Dalam penelitian ini peneliti mengamati implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Observasi dilakukan di setiap lokasi atau kantor dari satuan organisasi beserta orang-orang yang ada di lokasi tersebut sebagai objeknya. Pengamatan ini memungkinkan memberikan informasi bagi peneliti tentang pola dan perilaku objek penelitian di lapangan dalam mengupayakan fungsi serta peran *stakeholder* dalam pelaksanaan implementasi program bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.

Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dengan meninjau langsung ke lapangan tentang mekanisme pelaksanaan program bantuan rumah khusus bagi nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat yang dimulai dari tahap pengusulan program kepada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat. Mekanisme selanjutnya pengalokasian lahan dan penyerahan bantuan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten

Pesisir Barat sekaligus di kelola bersama-sama dengan masyarakat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implementasi berkaitan dengan ketersediaan yang terbatas sebagai lokasi pembangunan bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.

2. Data sekunder

Selain menggunakan data primer, peneliti juga memanfaatkan data sekunder. Menurut Sugiyono (2013 : 225) bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yaitu Undang-Undang, Peraturan Menteri, Tugas Pokok dan Fungsi dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Dokumentasi

Selain dengan menggunakan wawancara, penelitian ini juga melakukan dokumentasi sebagai sumber data penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mencari data penunjang dari pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, maka peneliti juga akan melakukan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud peneliti adalah dokumen penunjang yang didapatkan dari *stakeholder* terkait implementasi peraturan menteri perumahan rakyat (pera) nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.

Berikut adalah data dokumen yang didapatkan oleh peneliti antara lain :

Tabel 3. Data Dokumen Penelitian

NO	Nama Dokumen	Sumber Dokumen
1	Surat Keputusan tentang Penetapan Pegawai Pejabat Inti, Staf dan Struktur Organisasi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Ditjen Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung	Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Lampung
2	Dokumen Struktur dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat
3	Dokumen Bagan Struktur dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat
4	Daftar Nelayan Penerima Bantuan Rumah Khusus	Koperasi Nelayan Mina Makmur Lestari Kabupaten Pesisir Barat
5	Foto-foto Kegiatan Pelaksanaan dan Penelitian	Dinas Kelautan dan Perikanan dan Koperasi Nelayan Mina Makmur Lestari Kabupaten Pesisir Barat

Sumber : dari berbagai sumber, diolah oleh peneliti 2018

E. Teknik Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono (2011:332) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang diceritakan kepada orang lain. Miles and

Huberman dalam Sugiyono (2011:334-343), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data diartikan proses pemilihan, *focusing*, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Data yang ada dilapangan kemudian dirangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam tahap ini peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dalam penelitian pelaksanaan Program Bantuan Rumah Khusus bagi Nelayan dan mana yang bukan. Kemudian peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan pelaksanaan program Bantuan Rumah Khusus Nelayan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya untuk

menjelaskan implemmentasi program bantuan Rumah Khusus bagi Nelayan dalam mensejahterakan masyarakat yang belum memiliki rumah.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan dengan mengambil intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan sumber data prime dan sekunder sehingga diperoleh jawaban tentang implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Rumah Khusus (Studi Pada Kelompok Nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat).

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Menurut Moeloeng (2011 : 324) 4 (empat) kriteria tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Penerapan kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria derajat kepercayaan ini berfungsi untuk (a) Melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; (b) Mempertunjukkan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Teknik pemeriksaan keabsahan data ini antara lain:

- a. Perpanjangan Keikutsertaan Peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan yang dimaksud yaitu peneliti melakukan penelitian dilapangan sampai pada kejenuhan pengumpulan data yang diperoleh dengan membutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam mencapai tujuan dari hasil penelitian yang akan diperoleh.
- b. Ketekunan Pengamatan Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam penelitian ini, agar dapat meningkatkan derajat kepercayaan, pengamatan yang dilakukan adalah menguraikan secara rinci implementasi Program Bantuan Rumah Khusus bagi Kelompok Nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.
- c. Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzim dalam Moeloeng (2011 : 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam upaya

memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan pengecekan dari berbagai sumber, yaitu dengan mewawancarai beberapa informan yang berasal dari kalangan yang berbeda. Wawancara ini dilakukan dengan pihak Kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Provinsi Lampung, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, Koperasi Nelayan Mina Makmur Lestari. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi juga dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat.

2. Keteralihan (*transferability*)

Teknik ini berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representative mewakili populasi itu. Dengan demikian, pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ke tempat lain. Untuk melakukan keteralihan peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama dalam koordinasi *multi-stakeholder* dalam pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu

3. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, realibilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Peneliti dalam melakukan pengulangan dalam suatu

studi dua atau beberapa kali dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan realibilitasnya tercapai. Persoalan yang amat sulit dicapai disini ialah bagaimana mencari kondisi yang benar-benar sama dengan hasil penelitian dan fenomena yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu hasil penelitian ini benar atau tidak, maka penulis selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.

4. Kepastian (*confirmability*)

Menguji kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian oleh banyak orang maka hasil tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif. Hal ini dapat terlihat dari apa yang telah dilakukan peneliti dalam menguji kepastian ini adalah dengan seminar tertutup dan terbuka dengan mengundang teman sejawat dan pembimbing.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peneliti telah menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, mengenai “Implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) Nomor 10 tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Rumah Khusus (studi pada program rumah khusus bagi nelayan di kabupaten pesisir barat, kecamatan pesisir tengah) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang di capai. Seperti memenuhi kebutuhan kelompok nelayan dalam memiliki tempat tinggal yang layak dengan lingkungan yang baik. Mampu meningkatkan taraf kehidupan kelompok nelayan menjadi lebih memadai. Menstimulan kelompok nelayan agar lebih berkembang.
2. Implementasi program bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan memiliki kendala yang menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi. Faktor tersebut tentang ketersediaan lahan yang memadai guna lokasi pembangunan rumah bantuan bagi kelompok nelayan. Ketersediaan

lahan adalah hal penting dalam implementasi program bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan, hal itu disebabkan program tidak dapat dijalankan apabila tidak tersedia lahan yang memadai sebagai lokasi pembangunan rumah bantuan khusus bagi kelompok nelayan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan saran penelitian tentang “Implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) Nomor 10 tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Rumah Khusus (studi pada program rumah khusus bagi nelayan di kabupaten pesisir barat, kecamatan pesisir tengah)” sebagai berikut :

1. Meningkatkan pola koordinasi antara badan pelaksana dalam mengatasi kendala ketersediaan lahan yang memadai sebagai lokasi pembangunan.
2. Mempermudah upaya pembebasan lahan di tiap-tiap daerah
3. Memberikan ruang kepada kelompok nelayan untuk berperan aktif dalam implementasi tentang program bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moeleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik)*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

Jurnal

- Aksa, Ahmad Husnan. (2011) "Implementasi *Good Ornop Governance* (Studi Terhadap Pengalaman Ornop YLPMD Lampung dalam Membangun *Internal Governance*)." *Jurnal Administratio*, 2087-0825
- Ani, Serli dan Sulistio, Eko Budi. (2016) "Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi dan Guideline) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Provinsi Lampung". *Jurnal Administratio*, 2087-0825

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M2013 Tentang Pedoman Bantuan Rumah Khusus
- Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/2011 Tentang Bantuan Rumah Khusus.
- Surat Edaran Nomor : 01/SE/Dr/2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- UU-01-2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) Seorang warga negara berhak memperoleh penghidupan yang layak.

UUD 1945 pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Sumber Lainnya

<http://lampost.co/berita/bupati-pesisir-barat-resmikan-perumahan-khusus-nelayan>

<http://www.lampungonline.id/2016/08/hpn-2016-pemprov-lampung-bantu-2000.html>

<http://perumahan.pu.go.id/ditpnp/berita/show/13> diakses 15 Januari 2017

sejutarumah.id

<http://www.zonasiswa.com/2014/07/tujuan-negara-pendapat-ahli-dan-teori.html>
diakses pada tanggal 15 Januari 2017 pukul 01.08 wib

<http://pemerintahindonesia.blogspot.co.id/2014/10/uud-1945-pasa27-dan-28-tentang-hak.html> diakses pada tanggal 15 Januari 2017 pukul 05.45 wib